

BAB III

ANALISIS DATA

Partisipasi politik merupakan gambaran dari tingkat kesuksesan suatu Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan, selain itu juga dapat diartikan suatu kegiatan perseorangan ataupun kelompok yang ikut secara aktif untuk terjun secara langsung dalam kehidupan politik. Adapun partisipasi politik sendiri memiliki beberapa bentuk, seperti kegiatan dalam pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindak kekerasan (Qodir, 2016: 45-46). Dalam pembahasan kali ini penulis memilih bentuk kegiatan dalam pemilihan, yaitu pemberian suara secara langsung atau menggunakan hak pilihnya (*voters turn out*) dalam suatu Pemilu.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan di Indonesia secara langsung dan serentak dilaksanakan mulai tahun 2015. Pelaksanaan pilkada langsung dan serentak di Indonesia ini tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat lokal, dengan diadakannya Pilkada serentak ini maka akan terlihat bagaimana dinamika politik di daerah tersebut. Kota Yogyakarta juga melaksanakan Pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 15 Februari 2017. Pada Pilkada serentak tahun 2017 partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta meningkat, yaitu sebesar 70,8 % dan seluruh kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam hal memilih dibandingkan dengan tahun 2011. Kecamatan yang paling tinggi

peningkatan persentase partisipasinya dalam hal memilih adalah Kecamatan Tegalrejo yaitu sekitar 9 % peningkatannya dibandingkan dengan tahun 2011.

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Tegalrejo dalam Pemilihan Walikota tahun 2017 pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat agar turut berpartisipasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang menurut ahli diantaranya karakteristik sosial pribadi seseorang, penerimaan perangsang politik, sifat dari sistem partai yang di tempat seseorang tinggal, citra kandidat, modernisasi, konflik diantara pemimpin politik. Berikut adalah penjabaran faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.

A. Karakteristik Sosial Pribadi Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

Karakteristik sosial pribadi seseorang dapat kita lihat melalui seberapa besar seseorang mau peduli terhadap keadaan sosial, politik, dan ekonomi di lingkungannya. Biasanya karakteristik sosial pribadi seseorang dapat diukur dari status sosial ekonomi seseorang, jenis kelamin, dan usia seseorang (Rush dan Althoff, 2011: 167). Untuk mengetahui karakteristik sosial pribadi masyarakat Kecamatan Tegalrejo, maka saya melakukan wawancara dengan Ibu Siti Nurhayati, selaku anggota KPU Kota Yogyakarta divisi perencanaan, data dan informasi pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.15 WIB beliau mengatakan bahwa:

“hmm...kalau terkait sosial ekonomi sih, kalau ekonomi itu tidak terlalu mempengaruhi masyarakat dalam memilih, karena orang yang tidak bekerja pun atau pekerja serabutan itu juga ikut memilih dalam pemilihan

walikota kemarin, tetapi yang lebih mempengaruhi itu lebih ke sosial yang ada dimasyarakatnya yaa. Dan yang lebih banyak memilih itu ibu-ibu atau perempuan yaa, soalnya kan ibu-ibu itu punya potensi yaitu ceriwisnya itu loh, yang dimanfaatkan, jadi kan kalau diberi informasi atau berita itu cepat nangek dan menyebarnya.”

KPU Kota Yogyakarta sendiri menilai bahwa partisipasi masyarakat tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat ataupun jenis pekerjaan masyarakat, karena dalam realitanya semua masyarakat dari berbagai tingkat ekonomi atau semua jenis pekerjaan tetap melakukan pencoblosan pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan Bapak Heru Kuswanto selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tegalgrejo, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.00 WIB beliau mengatakan :

“Yaa...mempengaruhi mbak, waktu pas pemilihan walikota itu sih yang meningkat partisipasinya itu ya justru orang-orang yang menengah kebawah itu mbak sebenarnya, kan masyarakat Tegalgrejo kan beragam kan mbak pekerjaannya, misalnya kayak tukang, wiraswasta, kerja di bank, dokter, ya pns ada juga, tapi yang lebih banyak itu ya wiraswasta mbak, dan ya alhamdulillahnya itu semuanya ikut nyoblos mbak, ya walaupun kalau ada sosialisasi itu yaa kalau istilahnya kaya pegawai gitu jarang ikut karena kan pulang juga sudah sore-sore, jadi yang lebih banyak mendapat informasi itu ya yang ekonominya menengah kebawah mbak. Untuk jenis kelamin sih perempuan mbak yang lebih banyak mencoblos, ya utamanya itu ibu-ibu.”

Pada umumnya masyarakat banyak mengetahui bahwa seseorang yang mempunyai jabatan, para tokoh yang ada dimasyarakat ataupun yang mempunyai drajat yang lebih tinggi dimasyarakat, pasti lebih disegani di masyarakat dan pasti masyarakat akan mengikuti pendapat dari mereka. Namun Kenyataannya di Kecamatan Tegalgrejo status ekonomi di masyarakat tidak terlalu mempengaruhi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan

walikota tahun 2017, tetapi yang lebih mempengaruhi masyarakat yaitu sosial yang ada di masyarakat, karena masyarakat Kecamatan Tegalrejo masih peduli dengan lingkungan sekitarnya dan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin mereka kelak. Di Kecamatan Tegalrejo yang paling banyak menggunakan hak pilihnya adalah perempuan. Hal ini dapat kita ketahui melalui perolehan suara di Kecamatan Tegalrejo sebagai berikut.

Tabel 3.1

Perolehan suara per jenis kelamin di Kecamatan Tegalrejo Tahun 2017

Kecamatan Tegalrejo	Laki-laki	Perempuan	Total
DPT (Daftar Pemilih Tetap)	12.903	13.628	26.531
Menggunakan hak pilih	8.971	10.284	19.255

Sumber : kpu.go.id (diakses pada 2 Maret 2019)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan di Kecamatan Tegalrejo yang tercatat sebagai DPT memang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DPT laki-laki. DPT perempuan yaitu sebanyak 13.628 sedangkan DPT laki-laki hanya 12.903 dan yang menggunakan hak pilihnya pun juga banyak kaum perempuan yaitu sebesar 10.284 orang sedangkan laki-laki hanya 8.971 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenis kelamin perempuan

yang lebih banyak berpartisipasi dalam hal mencoblos atau menggunakan hak pilihnya.

Karakteristik sosial yang ada pada masyarakat Kecamatan Tegalrejo sangat kental khususnya di Kelurahan Tegalrejo, yang paling menonjol adalah sosial agamanya, layaknya seperti yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini, apabila seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, maka dari calon-calon pemimpin tersebut akan membuktikan diri siapa yang lebih memiliki nilai religius yang tinggi dan calon pemimpin tersebutlah yang akan dipilih oleh masyarakat. seperti yang disampaikan oleh Mas Anang dalam wawancaranya pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 13.23 WIB beliau mengatakan bahwa :

“kalau di lingkungan saya sih, yang mempengaruhi itu lebih kepada sosial yang ada di masyarakatnya sih mbak, kayak sosial agamanya gitu, ya kan ditempat saya itu kebanyakan agamanya itu islam mbak, jadi masyarakat itu lebih memilih yang keliatannya itu ya baik agamanya mbak, jadi kan kalau baik agamanya itu ya insyallah bisa diberi amanah.”

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa sistem politik yang ada di Kecamatan Tegalrejo khususnya di Kelurahan Tegalrejo dalam hal memilih seorang pemimpin, sangat erat kaitannya dengan agama yang mendominasi di daerah tersebut. Meskipun keadaan sosial dalam hal agama merupakan sesuatu yang sangat sentimentil dan dapat menyebabkan konflik sosial yang ada di masyarakat, namun realitanya itulah yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan karakteristik sosial pribadi seseorang cukup berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam bentuk

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota tahun 2017 di Kecamatan Tegalorejo.

B. Penerimaan Perangsang Politik

Pada indikator ini dapat dilihat dari bagaimana seseorang mempunyai keinginan untuk aktif mengikuti diskusi baik secara formal atau informal. Dalam hal ini penerimaan perangsang politik yang dimaksud adalah antusias masyarakat Kecamatan Tegalorejo agar mau ikut hadir dalam sosialisasi yang diadakan oleh KPU beserta jajarannya. Menurut James W. Vander Zanden (dalam buku Damsar, 2010: 152) mengartikan bahwa sosialisasi adalah proses interaksi sosial dengan seseorang yang mempunyai tujuan agar orang memperoleh sikap, pengetahuan, perilaku, dan nilai yang menjadi dasar untuk mau berpartisipasi efektif dalam masyarakat.

Keberhasilan sosialisasi sendiri tidak melulu hanya karena pemerintah sudah melakukan sosialisasi tersebut, ini juga membutuhkan kepedulian dari masyarakat untuk mau tau bagaimana sosialisasi dan apa isi dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Untuk mengetahui sejauh mana KPU beserta jajarannya sudah melakukan sosialisai mengenai pemilihan walikota tahun 2017, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Frenky Argitawan Mahendra selaku anggota KPU, divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.30, beliau menjelaskan bahwa :

“KPU pada saat pemilihan walikota tahun 2017 itu sudah melakukan sosialisasi, tapi kan KPU itu sosialisasinya dalam lingkup besar gitu, maksudnya tidak per Kecamatan tapi seluruh Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Kalau per kecamatan itu kami memberikan tanggung jawab kepada PPK yang ada di perkecamatan. Kita itu melakukan sosialisasi langsung ke rw/rt, pkk, atau pengajian ibu-ibu biar sosialisasi bisa langsung tersasar ke masyarakat.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Tegalarjo Bapak Heru Kuswanto pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.08 WIB dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“iya mbak benar, kami sudah melakukan sosialisasi kalau sasaran sosialisasi kami itu langsung ke rt/rw, pengajian ibu-ibu, pkk, dasawisma gitu mbak, jadi dalam sosialisasi yang kami lakukan itu kami menjelaskan bagaimana pemilihan walikota tahun 2017, siapa saja calonnya, partai pengusungnya dan visi misi dari calon mbak, terus kalau kita mau ngadain sosialisasi biasanya itu kita koordinasi ke rt/rw nya mbak, agar diumumkan bahwa kita akan ada sosialisasi, jadi nanti kita tinggal sosialisasi saja.”

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait pemilihan walikota tahun 2017. Dalam melakukan sosialisasi KPU memberikan tanggung jawab kepada setiap anggota PPK yang ada di kecamatan, karena KPU ruang lingkupnya Kota Yogyakarta dan agar sosialisasi yang dilakukan bisa lebih tersasar ke masyarakat dan dapat lebih optimal. Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) per kecamatan berjumlah 5 orang. Dalam mensosialisasikan di Kecamatan dari jumlah anggota yang ada tersebut dibagi lagi per kelurahan untuk melaksanakan sosialisasi. Dalam konteks pemilihan walikota tahun 2017, isi dari sosialisasinya adalah nomor urut pasangan calon, nama pasangan calon, partai pengusung pasangan calon serta visi dan misi yang dibawakan oleh pasangan calon.

Namun hal yang berbeda justru disampaikan oleh beberapa masyarakat yang saya wawancarai. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ani selaku masyarakat Kelurahan Karangwaru pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 11.13 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“waduh kalau sosialisasi itu, pada waktu pemilihan walikota itu ? setau saya sih gak ada ya mbak, kalau buat yang nanti untuk tahun 2019 itu mbak malah yang gencar banget sosialisasinya mbak di ibu-ibu pkk, terus di pengajian ibu-ibu gitu, kalau saya ya lumayan sering ikut itu pengajian disini mbak, tapi sih kalau kemaren tidak ada dan saya tidak ikut mbak.”

Wawancara yang saya lakukan di kelurahan berbeda dengan topik yang sama dengan masyarakat, yaitu saya mewawancarai Bapak Toto selaku masyarakat Kelurahan Bener pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 10.46 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“kalau di daerah saya sih ada sosialisasi mbak, tapi saya memang tidak bisa ikut waktu sosialisasi itu diadakan, soalnya saya ada acara lain sih mbak waktu itu.”

Ada juga statement dari masyarakat Kelurahan Karangwaru Ibu Nur yang diwawancarai pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 12.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“sosialisasi itu sih saya gaikut mbak, tapi kok kayaknya di rt saya gak ada ya mbak sosialisasi tentang pemilihan tahun 2017 kemarin itu mbak.”

Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang menunjukkan bahwa kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai akan diadakannya sosialisasi dan kurangnya antusias masyarakat untuk ikut sosialisasi yang diadakan oleh KPUD Kota Yogyakarta, membuat indikator untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat ini tidak begitu mempengaruhi

masyarakat dalam berpartisipasi untuk memilih dalam pemilihan walikota tahun 2017. Padahal sosialisasi ini merupakan salah satu cara yang disajikan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mempunyai pengetahuan ataupun gambaran tentang kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan walikota tahun 2017, sehingga masyarakat dapat lebih yakin dalam menentukan pilihannya yang akan di coblos.

Mengenai penerimaan perangsang politik ada juga parameter saya yaitu mengenai *money politic* yang bisa berbentuk apa saja baik itu berupa uang ataupun barang yang diberikan oleh salah satu kandidat yang mencalonkan diri. Untuk memastikan apakah dalam pemilihan walikota tahun 2017 terdapat politik uang, maka saya mewawancarai Bapak Tarto beliau berujar bahwa

“hmm...yang saya ketahui pada pemilihan walikota tahun 2017 itu ada sih mbak yang memberi gitu salah satu kandidat yang mencalonkan diri, tapi yang saya tau itu bukan berupa uang mbak, tapi berupa sembako mbak, tapi tetap saja mbak kalau saya sih enggak ngeliat dari itu tapi saya ya memilih dengan mengikuti hati nurani saja mbak”

Wawancara diatas memaparkan bahwa dalam pemilihan umum khususnya dalam pemilihan walikota tahun 2017 masih ada praktek politik uang tetapi bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk sembako atau barang. Di Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri masih banyak terdapat politik uang untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat, dalam konteks ini untuk mau menggunakan hak pilihnya untuk memilih kandidat yang mempraktekkan politik uang. Tetapi dari beberapa narasumber yang saya wawancarai hanya satu narasumber yang mengetahui adanya politik uang yang dilakukan salah satu kandidat yang mencalonkan diri. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa

indikator penerimaan perangsang politik ini kurang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota tahun 2017, khususnya pada parameter sosialisasi kepada masyarakat, praktek politik uang memang terjadi namun masyarakat tetap memilih sesuai keinginan hati nurani.

C. Sifat dari sistem partai ditempat seseorang tinggal

Dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu) tidak lepas dari partai politik yang mengusung masing-masing kandidat yang mencalonkan diri, biasanya masyarakat akan memilih kandidat yang diusung oleh partai politik yang paling dominan di lingkungannya. Partai politik sendiri dapat diartikan suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki cita-cita dan orientasi nilai-nilai yang sama, yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik (Qodir, 2016: 14). Untuk mengetahui sifat dari sistem partai di Kecamatan Tegalrejo, maka saya melakukan wawancara dengan Ibu Ani selaku masyarakat Kelurahan Karangwaru pada tanggal 28 Februari 2019, beliau mengatakan :

“Disini itu partai yang mendominasi itu partai PDI mbak, disini juga banyak banget yang fanatik dengan partai PDI itu mbak, apalagi kalau musim kampanye kayak gini, jadi yaa setau saya masyarakat disini sih milihnya ya partai itu mbak kebanyakan”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber maka dapat dikatakan bahwa partai yang mendominasi di Kecamatan Tegalrejo adalah partai PDIP karena tidak hanya satu narasumber yang mengatakan ini. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Joko selaku masyarakat Kelurahan Tegalrejo, pada

wawancara tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.47 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau disini partai yang banyak pengikutnya itu partai PDIP mbak, apalagi di kricak sama karangwaru sana mbak disana malah bisa dibilang basisnya PDI mbak. Saya sih terus terang mbak, waktu pemilihan walikota itu ya saya pilih yang diusung sama Partai PDI itu mbak. Jadi ya menurut saya ya partai yang mendominasi disini cukup mempengaruhi dalam memilih itu.”

Dalam wawancara terkait indikator yang sama yaitu sifat dan sistem partai yang dominan di Kecamatan Tegalrejo, jawaban yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Bapak Heru Kuswanto selaku Ketua PPK (Panitian Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tegalrejo pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 10.07. beliau mengucarkan bahwa :

“Dalam pemilihan walikota tahun 2017 kemarin itu justru yang menjadi walikota sekarang ini yaitu paslon nomor 2 Pak Haryadi malah kalah kalau di Kecamatan Tegalrejo, yang menang itu Pak Imam Priyono, karena kan di kecamatan tegalrejo ini yang mendominasi itu partai merah ya PDIP itu. Nah kan kemarin juga itu ya pak haryadi jatuhnya atau kalahnya itu ya diKecamatan Tegalrejo.”

Dari beberapa narasumber yang memberikan jawaban diatas menunjukkan bahwa sifat dan sistem partai yang dominan di Kecamatan Tegalrejo yang mendapatkan suara terbanyak, berarti indikator ini mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pemilihan atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan walikota tahun 2017. Partai yang mendominasi tersebut menang sebab masyarakat Kecamatan Tegalrejo merasa bahwa Partai tersebut mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hal ini juga dapat di buktikan dari hasil rekapitulasi suara yang ada di Kecamatan Tegalrejo yang akan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Perolehan suara di Kecamatan Tegalrejo dalam pemilihan walikota tahun 2017

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan Tegalrejo
1	Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si dan Achmad Fadli	53,88 %
2	Drs. H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA	46,12 %

Sumber : kpu.go.id

Data diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Tegalrejo pasangan nomor urut 1 yaitu Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si dan Achmad Fadli yang memperoleh suara lebih banyak yaitu sekitar 53,88 % dibandingkan dengan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Drs. H. Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, MA yang hanya mendapatkan suara 46,12 %. Hal ini juga yang menjadikan statement dari beberapa orang narasumber yang penulis wawancarai menjadi kuat karena memang di Kecamatan Tegalrejo pasangan yang diusung partai yang mendominasi di kecamatan tersebut yang mendapat suara terbesar. Dari hasil wawancara dan data yang disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sifat dari sistem partai ditempat seseorang tinggal cukup

mempengaruhi dalam berpartisipasi politik, khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Tegaljrejo.

D. Citra Kandidat

Citra kandidat merupakan salah satu unsur yang penting untuk menunjukkan siapa yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon. Citra kandidat dapat dilihat dari jenjang karir, prestasi, dan latar belakang kandidat. Dalam memilih pemimpin masyarakat biasanya melihat pasangan calon dari segi latar belakang kandidat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suratmoko dalam wawancaranya pada tanggal 19 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa :

“mengenai citra kandidat itu saya memilih pasangan calon lebih melihat dari latar belakangnya mbak, kan soalnya pasangan calon yang menjadi kandidat kan sudah tidak asing. Dan salah satu pasangn calon kan merupakan petahana mbak.”

Dalam melakukan pemilihan kepala daerah biasanya masyarakat akan melihat dari berbagai sudut pandangnya dalam memilih pasangan calon tidak lepas juga dengan yang dikatakan oleh narasumber pertama saya, beliau berujar bahwa dalam memilih pasangan calon hal yang paling mudah untuk dilihat adalah dari latar belakang pasangan calon kalau terkait dengan citra kandidat, karena kalau dilihat dari jenjang karir masyarakat biasanya kurang tertarik untuk mencari tahu tentang hal tersebut.

Dalam indikator yang sama tetapi berbeda narasumber dan pendapat. Saya juga mewawancarai Ibu Ani pada tanggal 28 Februari 2019 selaku masyarakat Kelurahan Karangwaru, dengan jawaban yang berbeda beliau mengatakan bahwa :

“kalau saya sih enggak liat dari prestasi, latar belakang ataupun jenjang karir, pokoknya saya waktu milih itu ya sesuai dengan hati nurani saya saja mbak.”

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Nur selaku masyarakat Kelurahan Karangwaru dalam wawancaranya pada tanggal 28 Februari 2019 beliau berkata bahwa :

“memilih walikota kemarin itu saya gak lihat dari citra yang mencalonkan diri e mbak, saya ya waton milih saja mbak, tapi ya saya milih yang paling dominan disinilah mbak partainya.”

Dari tiga narasumber yang saya wawancarai mengenai citra kandidat yang mencalonkan diri sebagai walikota tahun 2017, hanya satu narasumber yang melihat pasangan calon dari latar belakang, sedangkan dua orang narasumber yang selanjutnya tidak memikirkan tentang citra kandidat yang meliputi jenjang karir, prestasi yang diraih maupun latar belakang kandidat. Hal ini membuktikan bahwa citra kandidat tidak mempengaruhi masyarakat Kecamatan Tegalrejo dalam memilih pasangan calon. Kebanyakan masyarakat Tegalrejo mencoblos karena pengaruh sosial dimasyarakat dan kesadaran diri masing-masing. Pada pemilihan walikota tahun 2017 masyarakat Kecamatan Tegalrejo merasa kalau masyarakat sudah mengetahui siapa yang mencalonkan diri sebagai walikota Kota Yogyakarta tahun 2017, sebab yang mencalonkan diri sebagai walikota tahun 2017 adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota di periode sebelumnya. Masyarakat Kecamatan Tegalrejo tetap menggunakan hak pilihnya, meskipun sebagian masyarakat menilai bahwa yang mencalonkan diri sebagai walikota pada tahun 2017 kinerjanya tidak terlalu baik pada periode lima tahun sebelumnya. Sehingga masyarakat Kecamatan Tegalrejo tidak lagi melihat dari

segi citra kandidat masing-masing pasangan calon. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Citra Kandidat tidak mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pencoblosan.

E. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi massa modern

Pada poin ini membahas tentang bagaimana kemajuan dalam menggunakan medsos atau media sosial. Pada era sekarang ini media sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya dalam dunia politik, dalam konteks ini, misalnya sebagai alat yang digunakan KPU untuk memberikan informasi mengenai pemilihan umum pusat ataupun daerah. Mulai dari pendaftaran calon kandidat, pelaksanaan kampanye, rekapitulasi hasil perhitungan suara hingga penetapan calon terpilih. Dari kandidat yang mencalonkan diri pun juga memanfaatkan media sosial dengan cara membuat suatu akun yang dibentuk oleh tim pemenangan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain itu kedua pasangan calon juga mempunyai akun media sosial secara individu yang mana masing-masing memanfaatkan instagram dan facebook untuk berbagi informasi mengenai kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon.

Agar mengetahui apakah KPU sudah memanfaatkan kemajuan media sosial atau media massa ini dalam pemilihan walikota tahun 2017, maka saya mewawancarai Ibu Siti Nurhayati, selaku anggota KPU divisi perencanaan, data dan informasi pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 10.45 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“KPU juga sudah memanfaatkan media sosial mbak, seperti facebook dan instagram, tidak hanya itu kami juga punya website yang dipergunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemilihan walikota tahun 2017. Kalau di media sosial itu kami membagikan informasi terkait pemilihan walikota tahun 2017. Mulai dari pendaftaran bakal calon sampai penetapan calon tersebut,kan sekarang itu kita nilai masyarakat kota jogja juga sudah banyak yang melek teknologi. Dan kami lihat dari website yang kami punya itu jumlah pengunjung website kami setiap harinya itu lumayan banyak mbak.”

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat KPU Kota Yogyakarta juga mengikuti perkembangan jaman dengan menggunakan media sosial, beberapa contoh media sosial yang digunakan KPU Kota Yogyakarta adalah Facebook dan Instagram. Saat ini media sosial mudah sekali untuk diakses, kalangan umur yang mengaksespun beragam mulai dari remaja hingga orangtua. Jadi dalam menyebarkan informasi terkait pemilihan walikota tahun 2017 ini KPU Kota Yogyakarta merasa media sosial merupakan alat yang paling efektif untuk membagikan informasi kepada masyarakat. KPU Kota Yogyakarta juga merasa bahwa saat ini tidak mungkin seseorang tidak mempunyai gadget di era milenial ini. Dan KPU Kota Yogyakarta mengklaim bahwa website yang dibuat cukup banyak pengunjungnya meskipun pihak dari KPU Kota Yogyakarta tidak mengetahui dari daerah mana saja yang sudah mengakses website tersebut. Namun data yang ada di website KPU Kota Yogyakarta dinilai kurang lengkap karena pada saat peneliti ingin mengakses tentang hasil rekapitulasi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di website tersebut tidak tersedia secara detail, maksudnya di website tersebut hanya tersedia hasil rekapitulasi perolehan suara secara menyeluruh atau umum se Kota Yogyakarta.

Namun apakah masyarakat Kecamatan Tegalrejo juga mengikuti perkembangan jaman dan menggunakan sosial media untuk mencari informasi mengenai pemilihan walikota tahun 2017 ? Seperti yang kita ketahui masyarakat Kecamatan Tegalrejo termasuk masyarakat daerah perkotaan yang mana biasanya masyarakat perkotaan akan lebih peka dengan perkembangan teknologi yang ada dan akan lebih mudah mendapatkan informasi dari media massa atau media sosial mengenai pemiliha walikota tahun 2017. Untuk mengetahui seberapa indikator ini mempengaruhi masyarakat dalam memilih pada pemilihan walikota tahun 2017, maka peneliti mewawancarai beberapa masyarakat Kecamatan Tegalrejo yang *pertama* ialah Mas Anang masyarakat Kelurahan Tegalrejo dalam wawancaranya pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 13.29 WIB:

“oh iya saya pengguna internet, tapi kalau media sosial saya lebih sering menggunakan twitter sama instagram, saat pemilihan walikota tahun 2017 itu saya mencari informasi pasangan calon ya dari instagram sih kebanyakan, kalau website KPU sih, yang pas mau lihat rekapitulasi suara.”

Dalam poin yang sama, tetapi dengan jawaban yang sedikit berbeda dijelaskan oleh narasumber *kedua* Bapak Suratmoko masyarakat Kelurahan Tegalrejo pada tanggal 19 Februari pukul 12.13 WIB, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“pada pemilihan walikota tahun 2017 kemarin itu sih, saya tau siapa yang mencalonkan itu, ndak dari media sosial mbak tapi tau dari baliho atau pamflet-pamflet yang dijalan-jalan itu mbak.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber *ketiga* Ibu Ani masyarakat Kelurahan Karangwaru dalam wawancaranya pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 12.02 WIB :

“informasi pemilihan walikota tahun 2017 itu saya itu gak cari diinternet mbak atau di media sosial itu, soalnya saya hanya menggunakan media sosial itu paling untuk berhubungan dengan teman-teman lama saya saja mbak, tapi kalau tahu pasangan calonnya ya tau dari kampanye gitu mbak.”

Dalam indikator yang sama tetapi berbeda lokasi saya mewawancarai Bapak Yono masyarakat Kelurahan Kricak narasumber *keempat* pada tanggal 28 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa :

“saya tidak punya sosial media, saya memilih pasangan calon walikota tahun 2017 itu hanya dari partai yang paling dominan di daerah sini saja mbak”

Untuk lebih memperkuat pendapat dimasyarakat maka saya juga mewawancarai narasumber *kelima* Mba Dinda masyarakat Kelurahan Bener pada tanggal 13 Februari 2019

“saya punya sosial media mbak, tapi tidak untuk mencari informasi terkait pemilu sih mbak, saya pakainya ya hanya untuk berselancar biasa saja, seperti anak muda biasanya untuk liat-liat online shop mbak”

Dari beberapa narasumber yang saya wawancarai dapat disimpulkan bahwa empat dari lima narasumber tidak menggunakan media sosial sebagai alat untuk mencari informasi tentang pemilihan walikota Kota Yogyakarta tahun 2017. Hanya satu narasumber yang menggunakan sosial media untuk mencari informasi tersebut, sebab narasumber ini pada saat pemilihan walikota tahun 2017 beliau merupakan kader dari partai demokrat. Sehingga narasumber selalu melihat perkembangan tentang pemilihan walikota tahun 2017 dengan

menggunakan instagram yang dimiliki narasumber. Sedangkan empat narasumber yang lain tidak memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi mengenai kedua pasangan calon, kebanyakan narasumber memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk hal yang lain.

Selain membahas mengenai sosial media yang digunakan, pada poin ini juga menjelaskan mengenai peran dari kaum intelektual dalam pemilihan walikota tahun 2017, kaum intelektual yang dimaksud bisa saja hadir dari universitas ataupun dari pihak yang mengetahui tentang pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan walikota. Kaum intelektual ini biasanya memberikan gagasannya ataupun pemikirannya melalui sosialisasi atau seminar mengenai pemilihan kepala daerah, untuk memberikan wawasan kepada para pemilih. Untuk mengetahui apakah kaum intelektual berperan dalam mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan walikota tahun 2017, maka saya mewancarai Bapak Joko, beliau berkata bahwa :

“setau saya sih gak ada ya mbak, yang kayak ngadain seminar ataupun sosialisasi mengenai pemilihan walikota itu, yang saya tau ya KPUD Kota Yogyakarta saja mbak, yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat”

Hal ini membuktikan bahwa indikator ini tidak mempengaruhi masyarakat Kecamatan Tegalrejo untuk mau berpartisipasi politik, khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Masyarakat mengetahui pasangan calon dari baliho atau pamflet yang di pajang di jalan-jalan dan dari suatu kampanye yang

diadakan oleh pasangan calon. Terutama masyarakat Kecamatan Tegalrejo hanya memilih pasangan calon dari partai yang mengusungnya.